



RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2026

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TOBA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah Kabupaten Toba telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 (lima) tahun sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Agar pembangunan yang akan dilaksanakan mempunyai tujuan dan sasaran yang tepat, maka perlu disusun perencanaan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Disamping penyusunan RPJMD, pemerintah Kabupaten Toba juga harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk 1 (satu) tahun. Untuk itulah setiap OPD menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) tahun yang mengakomodir serta mengacu kepada RPJMD Kabupaten.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Renja mengacu kepada rancangan awal RKPD dengan memperhatikan kondisi serta mengevaluasi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat membuat suatu perencanaan yang baik dan matang dalam mengoptimalkan pencapaian renstra yang telah

ditetapkan sebelumnya. Penyusunan renja dilakukan dengan 2 (dua) tahapan yaitu tahapan merumusan rancangan Renja dan tahapan penyajian rancangan renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba.

Visi Kabupaten Toba 2025-2030 **yaitu “TOBA MANTAP 2029: Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya”**. Makna yang terkandung dalam visi Kabupaten Toba dijabarkan sebagai berikut :

Maju Daerahnya bermakna bahwa Kabupaten Toba menjadi daerah yang dapat berdiri sejajar dan bersaing dengan daerah lainnya dengan terwujudnya pembangunan yang memberikan hasil yang nyata dan bermanfaat maksimal kepada masyarakat; tersedia infrastruktur yang berkualitas secara merata; sumber daya manusia yang semakin berkualitas; serta terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Sejahtera Rakyatnya bermakna masyarakat menikmati kualitas hidup yang lebih baik ditandai dengan meningkatnya pendapatan, berkurangnya kemiskinan serta hasil-hasil pembangunan yang dirasakan secara lebih merata.

Berkelanjutan Pembangunannya bermakna pembangunan daerah yang berfokus kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat harus tetap memperhatikan kesejahteraan generasi yang akan datang.

Perwujudan visi tersebut dijabarkan dengan 6 misi yaitu :

1. Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak;

Misi ini berfokus kepada upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui optimalisasi kualitas pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan harkat dan martabat manusia khususnya masyarakat yang memerlukan layanan kesejahteraan sosial.

2. Membangun infrastruktur yang terintegrasi, berkualitas dan merata;

Misi kedua dimaksudkan untuk melakukan peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang lebih baik. Infrastruktur yang menjadi fokus adalah infrastruktur yang menjadi kepentingan masyarakat secara luas sesuai dengan kondisi daerah, yaitu jalan, irigasi, air minum dan pengelolaan air limbah.

3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi daerah dan mendukung kemandirian daerah;

Misi ketiga bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi daerah, yaitu pertanian dan pariwisata, untuk secara efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas dengan peningkatan produksi dan produktivitas serta upaya peningkatan nilai tambah dengan mendorong berkembangnya usaha-usaha yang memanfaatkan produk-produk unggulan daerah. Pembangunan ekonomi juga diharapkan untuk memberikan dukungan terhadap peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerah.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagai pelayan (parhobas) rakyat;

Misi keempat bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan aparatur yang berkompeten dan berintegritas serta berorientasi kepada pelayanan.

5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban;

Misi kelima ditujukan untuk memberikan landasan yang kuat demi terlaksananya pembangunan daerah serta berkembangnya usaha yang mendorong peningkatan ekonomi daerah.

6. Melestarikan nilai budaya dan kearifan lokal.

Misi ini bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya luhur untuk mempertahankan jati diri daerah serta mendukung berkembangnya pariwisata daerah.

Renja yang disusun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba selanjutnya digunakan dalam

penyusunan anggaran untuk tahun 2025 dengan mengacu kepada RPJMD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3794);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

- A. Maksud penyusunan renja adalah sebagai berikut :
 1. Adanya acuan/pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun.
 2. Terarahnya pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam 1 (satu) tahun.
- B. Tujuan penyusunan renja adalah tersedianya dokumen perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Ruang lingkup penyusunan renja ini terdiri dari proses evaluasi pelaksanaan renja sebelumnya dan menyusun beberapa program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tersusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan renja dengan mengemukakan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini menjelaskan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2024 serta menganalisis kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan mengacu kepada kebijakan Nasional dan Daerah serta prioritas pembangunan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini memuat tentang Rencana Pendanaan Penurunan Sunting, Rencana Pendanaan Penurunan Kemiskinan Ekstrim, Rencana Pendanaan Untuk Pelaksanaan Inovasi Dan Rencana Pencapaian SPM.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA

Pelaksanaan kegiatan di Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba berjalan dengan baik dan lancar dengan terlihatnya berkurangnya rumah-rumah tidak layak huni menjadi layak huni dan beberapa kawasan kumuh menjadi tidak kumuh. Disamping itu meningkatnya prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman/perumahan yang ada di Kabupaten Toba.

Adapun program-program dalam rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Kawasan Permukiman;
3. Program Pengembangan Perumahan;
4. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU);

Sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran di TA. 2024, dari 5 (lima) program tersebut diatas, semua program dilaksanakan. Kegiatan di TA. 2024 berupa pembangunan rumah layak huni merupakan kegiatan yang bersifat meningkatkan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan realisasi beberapa kegiatan yang tidak memenuhi hasil yang telah direncanakan, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mencoba membuat suatu kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut, yaitu antara lain :

- a) Melakukan koordinasi terhadap pihak-pihak yang terkait sebelum pelaksanaan kegiatan;
- b) Pengawasan kegiatan perencanaan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu lebih ditingkatkan.

Sekaitan dengan kebijakan dan tindakan di atas, dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di tahun 2024 di harapkan dapat memenuhi target kinerja yang telah direncanakan. Hasil evaluasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

TABEL TC.29 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 KABUPATEN TOBA

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output), sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024						Target program/ kegiatan Renja Tahun Berjalan Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)x 100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	4,99	40.190.000.000	2,01	6.194.794.763	4,99	451.670.000	2,66	174.684.010	4,99	8.770.364.000	4,99	15.097.426.173	100	37,57		
1 04 03 2 01	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen	5	3.190.000.000	-	-	1	368.320.000	1	149.391.710	100,00	40,56	1	400.000.000		506.975.110		15,89
1 04 03 2 01	Survei dan Pencetakan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen penetapan lokasi	5	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 04 03 2 01	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Perencanaan	1	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 04 03 2 01	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok yang dibentuk	1	345.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 04 03 2 01	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Kegiatan	23	345.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 04 03 2 01	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen	23	500.000.000	-	-	1	368.320.000	1	106.975.110	100	29,04	1	400.000.000	2	506.975.110	9	101,40
1 04 03 2 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen	1	1.200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 04 03 2 03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas permukiman kumuh yang ditangani	74,70	37.000.000.000	3,22	6.194.794.763	14,94	83.350.000	3,22	25.292.300	21,55	30,34	14,94	8.370.364.000	21,4	14.590.451.063	28,6	39,43
1 04 03 2 03 01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen	22	2.200.000.000	1	244.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	244.200.000	4,5	11,10
1 04 03 2 03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Unit Rumah	190	3.800.000.000	-	-	0	0	0	0	0	0	30	600.000.000	30	600.000.000	15,8	15,79
1 04 03 2 03	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Luas yang dibangun/ dipugar/diremajakan	21	28.350.000.000	3,22	2.665.043.469	0	0	0	0	0	0	8	7.270.364.000	11	9.935.407.469	53	35,05
1 04 03 2 03	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen pendataan dan verifikasi	10	500.000.000	-	-	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	10	20,00

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dengan dibentuknya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2022 dan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam hal pembangunan di bidang perumahan dan permukiman, diharapkan dapat membuat suatu kebijakan teknis dalam perencanaan, pelaksanaan dan peningkatan kualitas perumahan, permukiman dan kawasan kumuh.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman setiap tahunnya diharapkan dapat semakin meningkat dengan berkurangnya kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni dalam wilayah Kabupaten Toba serta meningkatkan pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) dalam bidang perumahan.

Dapat dilihat dari perkembangan serta peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman setiap tahunnya belum optimal dan maksimal. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2024 masih terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan kompleksitas pekerjaan yang berhubungan dengan masyarakat. Disamping hal tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masih memerlukan kegiatan yang berupa sosialisasi ataupun penyatuan pemahaman dengan pihak kecamatan terhadap tugas pokok dan fungsi yang masih baru.

Dalam melaksanakan tugas-tugas dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdapat pihak ketiga sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis ataupun pelaksanaan konstruksi fisik dalam penanganan kawasan kumuh serta pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dan perumahan. Pihak ketiga yang bekerjasama dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi keahlian yang dimilikinya sehingga tercipta wujud pelaksanaan kegiatan seperti yang diharapkan yang akhirnya dapat menciptakan tingkat pelayanan

yang baik kepada masyarakat sehingga pertumbuhan dan perkembangan masyarakat khususnya di bidang ekonomi juga dapat ditingkatkan.

Berikut ditampilkan tabel yang berisikan tentang pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba tahun 2024 dalam Tabel TC.30.

TABEL TC.30. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TOBA

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian Tahun ke-			Proyeksi			Catatan analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
				K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
1	2	3	4	6	7	8	8	10	10	12	12					13
I	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten yang di tangani													
				14,94 ha	39,84 ha	74,7 ha	0	0	0	74,7 ha	0				0	
II	Persentase Rumah Tidak Layak Huni		Berkurangnya jumlah unit RTLH													
				150 unit	150 unit	150 unit	0	0	0	150 unit	0			150 unit	0	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu strategis urusan perumahan permukiman adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kebijakan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dituangkan dalam peraturan di daerah;
2. Pengembangan kebijakan penyediaan rumah tinggal, sarana dan prasarana serta utilitas (PSU) perumahan yang dituangkan dalam peraturan di daerah;

3. Penyediaan atas peningkatan kualitas lingkungan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program pemugaran, peremajaan atas pemukiman kumuh;
4. Penyediaan rumah tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui fasilitasi pengembangan perumahan untuk MBR;
5. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan sanitasi rumah tangga bagi masyarakat kurang mampu;
6. Peningkatan kualitas perumahan melalui penyediaan PSU pada perumahan MBR;
7. Mengupayakan sumber-sumber dana alternatif untuk penyediaan /peningkatan kualitas rumah warga MBR.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Rancangan awal RKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman membuat beberapa program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Kawasan Permukiman;
3. Program Pengembangan Perumahan;
4. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
5. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Berdasarkan analisis kebutuhan serta keterbatasan dana dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Toba, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman membuat program-program untuk tahun 2026 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Perumahan;
3. Program Kawasan Permukiman;

4. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
 5. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).
- Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel TC.31. terlampir.

TABEL TC. 31.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026 KABUPATEN TOBA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Hasil Analisis Kebutuhan											
Rancangan Awal RKPD											Catatan Penting
No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2									
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.035.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.035.000.000	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	600.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	600.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	500.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	500.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	19 laporan	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	19 laporan	100.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	2.500.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	2.500.000.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	2.500.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	2.500.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12 orang	120.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12 orang	120.000.000	
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 orang	120.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 orang	120.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah pembayaran penunjang administrasi	12 bulan	790.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah pembayaran penunjang administrasi	12 bulan	790.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	10.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	30.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	50.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	50.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1												
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	4 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 2 laporan	6 650.000.000	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 2 laporan	11 650.000.000		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6 jenis	175.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6 jenis	175.000.000		
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	175.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	175.000.000		
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 bulan	600.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 bulan	600.000.000		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	50.000.000		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	550.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	550.000.000		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 bulan	250.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 bulan	250.000.000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	20 unit	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	20 unit	200.000.000		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	50.000.000		
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				1.550.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				1.550.000.000		
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			2 lokasi	200.000.000	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			2 lokasi	200.000.000		
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang berpotensi terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen data rumah di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	1 dokumen	100.000.000	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang berpotensi terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen data rumah di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	1 dokumen	100.000.000		
	Identifikasi Perumahan di Lokasi rawan bencana Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana kabupaten/kota	1 dokumen	100.000.000	Identifikasi Perumahan di Lokasi rawan bencana Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana kabupaten/kota	1 dokumen	100.000.000		
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			1 unit	1.250.000.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			1 unit	1.250.000.000		
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah korban bencana kabupaten/kota yang terhabilitasi	5 unit rumah	250.000.000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah korban bencana kabupaten/kota yang terhabilitasi	5 unit rumah	250.000.000		
	Pembangunan rumah bagi korban bencana		Jumlah Rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang terbangun	2 unit rumah	500.000.000	Pembangunan rumah bagi korban bencana		Jumlah Rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang terbangun	2 unit rumah	500.000.000		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	3	4 Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 5 unit rumah	6 500.000.000	7 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	8	9 Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	10 5 unit rumah	11 500.000.000	12	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			1 unit	100.000.000	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			1 unit	100.000.000		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 laporan	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 laporan	100.000.000		
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				7.400.000.000	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				7.400.000.000		
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepoluh) Ha		Jumlah dokumen	1 dokumen	400.000.000	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepoluh) Ha		Jumlah dokumen	1 dokumen	400.000.000		
	Penyusunan/review/legalisasi kebijakan bidang PKP		Jumlah dokumen kebijakan bidang PKP yang tersusun/terreview/ terlegalisasi	2 dokumen	400.000.000	Penyusunan/review/legalisasi kebijakan bidang PKP		Jumlah dokumen kebijakan bidang PKP yang tersusun/terreview/ terlegalisasi	2 dokumen	400.000.000		
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepoluh) Ha		Luas permukiman kumuh yang ditangani	8 ha	7.000.000.000	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepoluh) Ha		Luas permukiman kumuh yang ditangani	8 ha	7.000.000.000		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	30 unit rumah		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	30 unit rumah			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	1 laporan	250.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	1 laporan	250.000.000		
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh		Luas permukiman kumuh yang dipugar	5 Ha	6.750.000.000	Pelaksanaan Pemugaran kawasan Permukiman Kumuh		Luas permukiman kumuh yang dipugar	5 Ha	6.750.000.000		
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				4.750.000.000	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				4.750.000.000		
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten /kota		Jumlah rumah tidak layak huni		4.750.000.000	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten /kota		Jumlah rumah tidak layak huni		4.750.000.000		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepoluh) Ha		Jumlah RumahTidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepoluh) Ha yang diperbaiki	150 unit rumah	4.750.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepoluh) Ha		Jumlah RumahTidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepoluh) Ha yang diperbaiki	150 unit rumah	4.750.000.000		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)				2.650.000.000	PROGRAM Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)				2.650.000.000	
	Usan Penyelenggaraan PSU Perumahan				2.650.000.000	Usan Penyelenggaraan PSU Perumahan				2.650.000.000	
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		Jumlah Dokumen Perencanaan penyediaan PSU Perumahan	2 dokumen	200.000.000	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		Jumlah Dokumen Perencanaan penyediaan PSU Perumahan	2 dokumen	200.000.000	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah lokasi perumahan yang di sediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	16 lokasi	2.000.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah lokasi perumahan yang di sediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	16 lokasi	2.000.000.000	
	Kordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		Jumlah laporan hasil kordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	1 laporan	250.000.000	Kordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		Jumlah laporan hasil kordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	1 laporan	250.000.000	
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Penguasa		Jumlah laporan hasil serah terima PSU Perumahan yang tervifikasi dari penguasa	1 laporan	200.000.000	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Penguasa		Jumlah laporan hasil serah terima PSU Perumahan yang tervifikasi dari penguasa	1 laporan	200.000.000	
				TOTAL	21.385.000.000				TOTAL	21.385.000.000	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun berdasarkan peraturan yang berlaku. Selain dilakukan analisis kebutuhan akan program-program yang sesuai dengan bidang perumahan dan permukiman, juga dilakukan proses penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RKPD, dengan melakukan musrenbang kecamatan dalam hal menampung aspirasi dari kecamatan untuk kemudian disusun sebagai satu kesatuan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Toba, disamping menampung aspirasi dari anggota legislatif yang telah melakukan kunjungan langsung ke lapangan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam bidang perumahan dan permukiman, maka perlu dilakukan perumusan perencanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan serta pengawasan teknis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati. Hal ini berkaitan dengan penyusunan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan peraturan-peraturan yang terkait sehingga terjadi pemerataan pembangunan serta dapat meningkatkan pencapaian rencana jangka panjang yang telah ditetapkan.

Usulan dan program yang dimaksud dapat dilihat pada tabel TC.32 tentang usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2026 sebagai berikut :

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 -2045

RPJPN 2025-2045 yang ditetapkan melalui UU RI No. 59 Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 2025-2045. Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Visi Indonesia Emas 2045 merupakan manifestasi visi bernegara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi. Hal ini dilakukan dengan pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar lainnya untuk mendukung kualitas sumber daya manusia, kualitas lingkungan hidup, penurunan kemiskinan, serta mendorong produktivitas ekonomi.

Penyediaan perumahan diarahkan untuk memastikan seluruh rumah tangga menempati rumah yang layak, terjangkau dan berkelanjutan. Dari sisi pembiayaan perumahan, kebijakan difokuskan untuk meningkatkan rasio pembiayaan perumahan terhadap PDB. Kebijakan dilakukan melalui :

- a. penyediaan perumahan layak dan terjangkau sesuai karakteristik wilayah;
- b. pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan;

- c. penanganan permukiman kumuh dan peremajaan kota secara inklusif;
- d. reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan tepat sasaran serta perluasan akses pembiayaan perumahan;
- e. optimalisasi pemantapan sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan; serta
- f. reformasi perundang-undangan dan regulasi terkait kewenangan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah di sektor perumahan.

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 – 2029

a) Visi dan Misi Presiden 2025-2029

Visi Misi Presiden 2025-2029 disusun RPJMN 2025-2029 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan visi **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi yang dikenal sebagai Asta Cita :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

b) Agenda Pembangunan

Di dalam RPJMN 2025-2029 terdapat 8 (delapan) Agenda Pembangunan yang merupakan Prioritas Pembangunan (PN) yang akan dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun kedepan:

PN 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

PN 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

PN 4. Memperkuat sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan Z), dan penyandang disabilitas.

PN 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Prioritas keenam yaitu upaya membangun dari

desa dan dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan.

PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

PN 8. Memperkuat penjelasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

c) Pengarusutamaan Dalam RPJMN 2025-2029

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN tahun 2025 - 2029 telah ditetapkan 5 (lima) pengarusutamaan Pembangunan dengan esensi memperluas kemanfaatan dari hasil pembangaunan dan mengurangi dampak yang tidak di inginkan, sehingga tercipta pemerataan dan keadilan untuk seluruh Masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Pengarusutamaan dilakukan melalui pengintegrasian secara konsisten pendekatan :

- a) Gender dan Inklusi Sosial,
- b) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,
- c) Transformasi Digital,
- d) Pembangunan Rendah Karbon, dan
- e) Pembangunan Berketahanan Iklim ke dalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah (pusat-daerah), serta inisiatif pembangunan lainnya yang dilakukan oleh *non state actors*.

C. Arah Kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Arah dan kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPerkim) difokuskan pada penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan ini mencakup peningkatan akses perumahan, pengembangan sistem pembiayaan, reformasi subsidi, dan penataan kawasan kumuh dengan visi dan misi sebagai berikut :

a) Visi :

"Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni, Aman, dan Berkelanjutan"

b) Misi :

1. Mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni dan produktif
2. Meningkatkan ketersediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana, dan utilitas umum (PSU) di kawasan permukiman.
4. Meningkatkan tata kelola perumahan dan kawasan permukiman yang baik dan berkelanjutan.
5. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman.

Untuk mendukung visi dan misi tersebut dilakukan dengan beberapa strategi yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pembangunan.
2. Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman.
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Hidup.

4. Penguatan Kelembagaan dan Regulasi.

D. Peraturan Perundangan Bidang Perumahan

Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan fungsi di bidang perumahan dilandasi peraturan perundangan yang terkait dengan bidang perumahan yaitu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

UU Perumahan dan Kawasan Permukiman membagi tugas dan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan permukiman mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi.
- b. Menyusun dan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota.
- c. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman.
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota.
- e. Melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota.
- f. Melaksanakan melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota.
- g. Melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman.

- h. Melaksanakan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman berpedoman pada kebijakan nasional.
- i. Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.
- j. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota.
- k. Menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba.

Adapun wewenang Pemerintah Kabupaten / Kota dalam menjalankan tugasnya yaitu :

- a. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota.
- b. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota.
- c. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota.
- d. Melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundangundangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota.
- e. Mencadangkan atau menyediakan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR.
- f. Menyediakan prasarana dan sarana pembangunan perumahan bagi MBR pada tingkat kabupaten/kota.
- g. Memfasilitasi kerja sama pada tingkat kabupaten/kota antara pemerintah kabupaten/kota dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

- h. Menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota.
- i. Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota.

Di samping mengatur tugas dan wewenang, UU ini juga mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah pendanaan dan pembiayaan, hak kewajiban dan peran masyarakat. UU ini mendefinisikan permukiman kumuh sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan, terdiri dari pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat, serta upaya peningkatan kualitas permukiman, yaitu pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam bidang peningkatan pembangunan infrastruktur, maka disusun tujuan dan sasaran rencana kerja yang mengacu kepada renstra PD yaitu :

A. Tujuan :

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET TA. 2026
1.	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana perumahan permukiman	Indeks Perumahan dan Permukiman	0,288

B. Sasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TA. 2026
1.	Meningkatnya kualitas perumahan rakyat	Persentase Rumah Layak Huni	85,54 %
2.	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	9,71 %
3.	Meningkatnya ketersediaan PSU perumahan	Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU	63,50 %
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi Internal AKIP	77,70 %

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Toba dan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta analisis kebutuhan, maka program dan kegiatan untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN;
 - a) Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN;
 - a) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha;
 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
 - b) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh;
 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh.
3. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH;
 - a) Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota.

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha;
 - Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru.
4. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU);
- a) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.
- Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan;
 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan
 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang.
5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Secara keseluruhan Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel TC. 33. berikut ini :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan ndikatif program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026 dilakukan dengan memprioritaskan program yang menjadi tugas pokok fungsi serta rencana kerja kabupaten yang ditetapkan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Penurunan Stunting, Penanganan Kemiskinan Ekstrim, Pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan Pelaksanan Inovasi dengan rencana pendanaan sebagai berikut :

1. Penurunan Stunting dan Penanganan Kemiskinan Ekstrim

Dalam rangka penurunan stunting dan Penanganan Kemiskinan Ekstrim Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyusun rencana kerja tahun 2026 ke dalam beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan dengan mengalokasikan anggaran sebagai berikut :

a) Program Kawasan Permukiman

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan alokasikan anggaran sebesar Rp 710.000.000,00.

b) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan alokasi anggaran sebesar Rp 350.000.000,00.

2. Pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Minimal)

Untuk pelaksanaan SPM, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyusun rencana kerja tahun 2025 ke dalam Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sub kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana dengan alokasi anggaran Rp 100.000.000,00.

Secara keseluruhan rencana pendanaan untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada Tabel SIPD berikut ini :

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
1			2		3	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 04 01 2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3	4	5	6	7	8	9	10
1 04 01 2.09			01 Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	Kabupaten Toba	24 unit	199,878,000	DAU		24 unit	215,000,000
1 04 01 2.09			06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Toba	18 unit	12,000,000			18 unit	16,000,000
1 04 02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN									600,000,000
1 04 02 2.01			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Tersusnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena	lokasi		-				100,000,000
1 04 02 2.01			07 Identifikasi Perumahan di Lokasi rawan bencana kabupaten/Toba		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi rawan bencana kabupaten/ Kota	Dokumen		-			1 dokumen	100,000,000
1 04 02 2.03			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 unit	100,000,000				500,000,000
1 04 02 2.03			01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah korban bencana kabupaten/kota yang terhabilitasi	Kabupaten Toba	2 unit rumah	100,000,000			2 unit rumah	100,000,000
1 04 02 2.03			04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah		-			2 unit rumah	200,000,000
1 04 02 2.03			09 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Unit Rumah		-			2 unit rumah	200,000,000
1 04 03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					860,000,000	DAU			2,120,000,000
1 04 03 2.02			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				1 dokumen	150,000,000				-
1 04 03 2.02			08 Penyusunan/review/legalisasi kebijakan bidang PKP		Jumlah dokumen kebijakan bidang PKP yang tersusun/terreview/terlegalisasi	Kabupaten Toba	1 dokumen	150,000,000	DAU			-

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
1			2		3	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						4	5	6	7	8	9	10
1	04	03	2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				710,000,000	DAU			2,120,000,000
1	04	03	2.03	04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Kabupaten Toba	1 laporan	150,000,000			1 laporan	300,000,000
1	04	03	2.03	13 Pelaksanaan Pemugaran kawasan Permukiman Kumuh	Luas permukiman kumuh yang dipugar	Kabupaten Toba	0,4 Ha	560,000,000			1,3 Ha	1,820,000,000
1	04	04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Kabupaten Toba		450,000,000	DAU			900,000,000
1	04	04	2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten /kota			180 unit	450,000,000				900,000,000
1	04	04	2.02	01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah RumahTidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki		10 unit rumah	350,000,000			20 unit rumah	700,000,000
1	04	04	2.01	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan		1 laporan	100,000,000			1 laporan	200,000,000
1	04	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				675,000,000	DAU			1,250,000,000
1	04	05	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Kabupaten Toba		675,000,000				1,250,000,000
1	04	05	2.01	01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan penyediaan PSU Perumahan		1 dokumen	75,000,000			1 dokumen	100,000,000

KODE			Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	04	05	03	03	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	1 laporan	100,000,000			1 laporan	200,000,000	
1	04	05	10	10	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembangan	1 laporan	100,000,000			1 laporan	150,000,000	
1	04	05	12	12	Jumlah lokasi perumahan yang di sediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	2 lokasi	400,000,000			4 lokasi	800,000,000	
TOTAL							5,124,464,000				8,316,065,000	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				19 Laporan	100.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.500.000.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	3.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2.500.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		3.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	120.000.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal 1. Peningkatan kualitas dan pemertaan infrastruktur	-	-	120.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	120.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal 1. Peningkatan kualitas dan pemertaan infrastruktur	-		120.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	790.000.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal 1. Peningkatan kualitas dan pemertaan infrastruktur	-	-	795.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	4 Paket	10.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal 1. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur	-		15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	30.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal 1. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur	-		30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	50.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal 1. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	650.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		650.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	175.000.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4		6	7	5 Unit	175.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	600.000.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	650.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	50.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	550.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal 1. Peningka tan kualitas dan pemer ataan infrastruktur	-		600.000.000,00		
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	250.000.000,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal 1. Peningka tan kualitas dan pemer ataan infrastruktur	-		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	200.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal 1. Peningka tan kualitas dan pemer ataan infrastruktur	-		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					20 Unit	50.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal 1. Peningka tan kualitas dan pemer ataan infrastruktur	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-				-	1.550.000.000,00						-	1.550.000.000,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-				-	200.000.000,00			-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal 1. Peningka tan kualitas dan pemer ataan infrastruktur	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastrukt r dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Penin gkatan Ekonomi Masyarakat Lokal 1. Peningka tan kualitas dan pemer ataan infrastruktur	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peninggkatan Ekonomi Masyarakat Lokal 1. Peningkatan kualitas dan pemertaan infrastruktur	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	1.250.000.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peninggkatan Ekonomi Masyarakat Lokal 1. Peningkatan kualitas dan pemertaan infrastruktur	-		1.250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				5 Unit Rumah	250.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peninggkatan Ekonomi Masyarakat Lokal 1. Peningkatan kualitas dan pemertaan infrastruktur	-		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				5 Unit Rumah	500.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota				5 Unit Rumah	500.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Kualitas dan pemerataan infrastruktur	-		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	-			-	100.000.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Produktivitas Ekonomi Masyarakat Lokal	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-			-	7.400.000.000,00						-	7.600.000.000,00	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	400.000.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Produktivitas Ekonomi Masyarakat Lokal	-		600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				2 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Produktivitas Ekonomi Masyarakat Lokal	-		600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	7.000.000.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	7.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	250.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh														
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				5 Ha	6.750.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		6.750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)						
											NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
4.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-			-	4.750.000.000,00						-		4.750.000.000,00				
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.750.000.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal 1. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur	-	-		4.750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki					150 Unit Rumah	4.750.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal 1. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur	-			4.750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
5.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-			-	2.650.000.000,00						-		2.650.000.000,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-			-	2.650.000.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	2.650.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	250.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan															
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				16 Lokasi	2.000.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		2.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		J U M L A H														22.215.000.000,00	
		21.385.000,00														22.215.000.000,00	

BAB V

PENUTUP

RENJA Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Toba Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2026.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renja 2026 akan memerlukan koordinasi, konsolidasi dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata.

Dengan ditetapkannya RENJA Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Balige,

2025

**Plt. Kepala Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Toba**

DAVID SYAH IDRIS BANGUN, ST, M.Si

Pembina

NIP. 19791231 200804 1 001